Research and Development Journal Of Education
Vol. 12, No. 2, Oktober 2026, Pp: 960 – 973 p–ISSN 2406-9744
DOI: https://doi.org/10.30998 e–ISSN 2657-1056
Available online at https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE

DEKONTRUKSI ETNOFOBIA DIGITAL MELALUI PENDEKATAN MULTIKULTURAL JAMES A. BANKS DALAM PEMBELAJARAN PAI

Amri Afriadi[1], Novala Arum Salsabillah[2(*)], Sunhaji[3]
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia[123]
Novalaarum123@gmail.com[1], 254120600054@mhs.uinsaizu.ac.id[2], a.sunhaji@uinsaizu.ac.id[3]

Received: 17 Oktober 2026
Revised: 23 Oktober 2026
Accepted: 23 Oktober 2026

Abstract

Perkembangan media digital telah memperluas interaksi antar-etnis sekaligus menciptakan peluang bagi penyebaran stereotip, prasangka, dan ujaran kebencian terhadap kelompok etnis tertentu. Etnofobia digital menjadi tantangan bagi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membina siswa agar mampu merespons keberagaman secara kritis dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dekonstruksi etnofobia digital melalui pendekatan pendidikan multikultural James A. Banks dalam pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan analisis konseptual kritis terhadap literatur tentang pendidikan multikultural, etnofobia digital, dan pendidikan Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa lima dimensi pendidikan multikultural Banks yakni integrasi konten, proses konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi keadilan, serta budaya sekolah dan struktur sosial yang memberdayakan dapat berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menantang prasangka etnis di ruang digital. Dalam pembelajaran PAI, kerangka kerja ini dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam seperti *tabayyun* (verifikasi informasi secara cermat), *ta'āruf* (saling mengenal dan memahami), serta keadilan untuk menumbuhkan literasi digital kritis dan tanggung jawab etis siswa. Kebaruan (*originality*) penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya terhadap etnofobia digital sebagai masalah konstruksi pengetahuan dan prasangka dalam pembelajaran PAI. Model konseptual yang dihasilkan ini memerlukan pengujian empiris untuk menilai penerapannya dalam praktik pendidikan.

Keywords: Dekontruksi; Etnofobia Digital; James A. Banks; Pendidikan Multikultural; Pendidikan Agama Islam

(*) Corresponding Author: Salsabillah, novalaarum123@gmail.com

How to Cite: Afriadi, A., Salsabillah, N. A., & Sunhaji. (2026). DEKONTRUKSI ETNOFOBIA DIGITAL MELALUI PENDEKATAN MULTIKULTURAL JAMES A. BANKS DALAM PEMBELAJARAN PAI. *Research and Development Journal of Education*, 12(2), 960-973.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara individu memperoleh informasi, membangun identitas, dan berinteraksi dengan kelompok sosial yang berbeda. Media sosial memungkinkan masyarakat mengenal beragam latar belakang etnis melalui pertukaran informasi, komunikasi, dan representasi budaya. Namun, keterbukaan tersebut tidak selalu menghasilkan hubungan sosial yang inklusif. Ruang digital juga dapat menjadi tempat berkembangnya stereotip, prasangka, diskriminasi, dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok etnis tertentu (Madriaza et al., 2025). Informasi yang disebarkan tanpa verifikasi, komentar bernada merendahkan, serta generalisasi terhadap karakter suatu kelompok dapat membentuk pemahaman yang keliru tentang keberagaman.

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa keterpaparan terhadap konten kebencian dan diskriminasi di media sosial secara konsisten memperburuk prasangka antarkelompok (Croucher et al., 2020). Dalam konteks ini, persoalan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga menyangkut cara individu membangun pengetahuan, menilai perbedaan, dan menentukan sikap terhadap kelompok lain.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam konteks tersebut adalah etnofobia digital. Etnofobia digital dipahami sebagai kecenderungan berupa ketakutan, kecurigaan, penolakan, atau prasangka terhadap kelompok etnis tertentu yang muncul maupun diperkuat melalui interaksi digital (Forberg & Schilt, 2023). Istilah ini digunakan sebagai konsep analitis untuk memahami bagaimana representasi negatif suatu kelompok dapat diterima, diulang, dan dinormalisasi dalam komunikasi daring. Etnofobia digital tidak dapat disamakan dengan kritik terhadap tindakan individu atau praktik budaya tertentu karena persoalannya terletak pada generalisasi yang menempatkan seluruh anggota kelompok sebagai pihak yang memiliki sifat negatif yang sama (Kurniawan et al., 2026). Ketika penilaian semacam ini diterima tanpa pemeriksaan kritis, identitas etnis dapat berubah menjadi dasar untuk membenarkan pengucilan dan perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, penanganan etnofobia digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan pengendalian perilaku di media sosial, tetapi juga mengkaji proses pembentukan pengetahuan dan prasangka yang melatarbelakanginya (Cera, 2023).

Dalam bidang pendidikan, persoalan tersebut menempatkan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada posisi yang strategis sekaligus menantang. PAI tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab pedagogis dalam membentuk sikap, pertimbangan moral, dan perilaku sosial peserta didik. Nilai tabayyun sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 6 menegaskan pentingnya memeriksa informasi sebelum mengambil keputusan, sedangkan Q.S. al-Hujurat [49]: 13 memberikan landasan etis mengenai keberagaman manusia dan pentingnya saling mengenal (ta‘āruf). Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam Q.S. al-Ma’idah [5]: 8, yang mengingatkan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil. Nilai-nilai tersebut relevan untuk membangun pembelajaran PAI yang menghubungkan ajaran Islam dengan persoalan nyata dalam kehidupan digital. Meskipun demikian, penyampaian nilai keagamaan secara normatif belum dengan sendirinya menjamin kemampuan peserta didik untuk mengenali manipulasi informasi, mempertanyakan stereotip, dan merespons ujaran kebencian secara bertanggung jawab. Karena itu, diperlukan kerangka pembelajaran yang membantu peserta didik menghubungkan prinsip keagamaan dengan analisis kritis terhadap informasi dan relasi sosial di ruang digital.

Salah satu kerangka teoretis yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pendidikan multikultural James A. Banks. Banks (1993) menekankan bahwa pengetahuan tidak terlepas dari nilai, perspektif, dan kepentingan pihak yang membentuknya. Perspektif ini penting karena informasi mengenai kelompok etnis di ruang digital tidak selalu merepresentasikan kenyataan secara utuh dan objektif. Representasi tertentu dapat dibentuk melalui pemilihan informasi, sudut pandang, dan pengulangan narasi yang akhirnya memengaruhi cara seseorang memahami kelompok lain. Selanjutnya, Banks (1995) mengembangkan pendidikan multikultural melalui lima dimensi, yaitu integrasi konten (*content integration*), proses konstruksi pengetahuan (*knowledge construction process*), reduksi prasangka (*prejudice reduction*), pedagogi kesetaraan (*equity pedagogy*), serta pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak cukup dilakukan dengan menambahkan materi tentang keberagaman ke dalam kurikulum. Pendidikan juga perlu mengkaji bagaimana

pengetahuan dibentuk, bagaimana prasangka berkembang, bagaimana pembelajaran berlangsung secara adil, dan bagaimana lingkungan pendidikan mendukung hubungan sosial yang inklusif.

Sejumlah penelitian telah membahas relevansi pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam dan penanganan prasangka sosial. Dalam penelitian Rahman tahun 2025, yang mengkaji rekonstruksi pendidikan multikultural untuk pendidikan Islam melalui analisis konseptual terhadap lima dimensi Banks dalam konteks Indonesia. Kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami hubungan antara kerangka pendidikan multikultural dan karakteristik pendidikan Islam (Rahman, 2025). Penelitian lainyang dilakukan oleh Husni dan Kawan-kawannya pada 2024, juga membahas pandangan guru Pendidikan Agama Islam mengenai kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, dan signifikansi pendidikan multicultural (Husni et al., 2024). Sementara itu, James Banks memberikan pijakan teoretis untuk menelaah hubungan antara konstruksi pengetahuan dan kepentingan sosial dalam pendidikan (Banks, 1993). Literatur tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan multikultural relevan untuk membicarakan prasangka, relasi antarkelompok, dan pembelajaran agama. Akan tetapi, fokus penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan persoalan khusus yang dikaji dalam artikel ini. Berdasarkan literatur yang ditelaah untuk penyusunan kajian ini, masih diperlukan pembahasan yang secara terarah menghubungkan etnofobia digital, proses pembentukan prasangka etnis, dan penggunaan lima dimensi pendidikan multikultural Banks dalam pembelajaran PAI. Celah tersebut menjadi titik tolak artikel ini, bukan sebagai klaim bahwa belum pernah ada penelitian lain yang membahas tema serupa, melainkan sebagai fokus analisis yang perlu diperdalam.

Untuk mengisi ruang kajian tersebut, artikel ini menggunakan istilah dekonstruksi secara operasional sebagai proses mengurai dan mempertanyakan asumsi, generalisasi, serta representasi yang mendasari prasangka etnis di ruang digital. Penggunaan istilah ini tidak dimaksudkan sebagai penerapan penuh teori dekonstruksi Jacques Derrida, tetapi sebagai pendekatan analitis-kritis untuk menelaah bagaimana narasi negatif mengenai kelompok etnis dibentuk dan diterima sebagai kebenaran. Dalam pembelajaran PAI, proses tersebut dapat diarahkan melalui kegiatan memeriksa sumber informasi, membandingkan representasi digital dengan konteks yang lebih luas, mengidentifikasi generalisasi yang diskriminatif, serta mendiskusikan tanggung jawab etis dalam berkomunikasi. Lima dimensi Banks digunakan untuk menyusun kerangka analisis yang menghubungkan materi pembelajaran, proses pembentukan pengetahuan, pengurangan prasangka, keadilan pedagogis, dan budaya sekolah yang inklusif. Dengan demikian, dekonstruksi etnofobia digital diposisikan bukan sekadar sebagai upaya menolak konten kebencian, melainkan sebagai proses pendidikan untuk meninjau kembali cara peserta didik memahami perbedaan dan membentuk penilaian terhadap kelompok lain.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dekonstruksi etnofobia digital melalui pendekatan pendidikan multikultural James A. Banks dalam pembelajaran PAI. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi relevansi lima dimensi pendidikan multikultural Banks untuk mengurai prasangka etnis dalam ruang digital serta merumuskan keterkaitannya dengan nilai tabayyun, ta‘āruf, dan keadilan dalam pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pembelajaran PAI yang tidak hanya menekankan pemahaman normatif terhadap nilai keberagaman, tetapi juga mendorong literasi digital kritis, refleksi etis, dan sikap adil terhadap kelompok yang berbeda. Karena penelitian ini berbasis studi kepustakaan, kontribusi yang dihasilkan berupa kerangka konseptual yang masih memerlukan pengujian empiris dalam praktik pembelajaran.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*Study Literatur*) dan analisis konseptual-kritis. Studi literatur difungsikan sebagai metode riset mandiri untuk mensintesis bukti-bukti empiris dan membangun model konseptual yang relevan (Snyder, 2024). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis gagasan, konsep, dan relevansi teori pendidikan multikultural James A. Banks dalam mengkaji dekonstruksi etnofobia digital pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya James A. Banks yang membahas pendidikan multikultural, konstruksi pengetahuan, dan transformasi kurikulum, khususnya publikasi tahun 1993 dan 1995. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah dan literatur akademik yang membahas etnofobia, prasangka etnis di ruang digital, literasi digital kritis, pendidikan multikultural, serta pendidikan Islam. Ayat Al-Qur'an yang relevan, yaitu Q.S. al-Hujurat [49]: 6 dan 13 serta Q.S. al-Ma'idah [5]: 8, digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis keterkaitan antara verifikasi informasi, pengenalan terhadap keberagaman, dan prinsip keadilan dalam pembelajaran PAI. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap analisis hubungan antara prasangka etnis digital dan pendidikan multikultural.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pemilihan, pembacaan, dan pencatatan literatur yang relevan. Analisis data dilaksanakan secara bertahap melalui identifikasi konsep utama, pengelompokan temuan berdasarkan tema, interpretasi kritis, dan sintesis konseptual (Snyder, 2019). Lima dimensi pendidikan multikultural Banks, yaitu integrasi konten (*content integration*), proses konstruksi pengetahuan (knowledge construction process), reduksi prasangka (*prejudice reduction*), pedagogi kesetaraan (*equity pedagogy*), serta pemberdayaan budaya dan struktur sekolah (*empowering school culture and social structure*), digunakan sebagai kerangka analisis utama (Damanik & Kedhaton, 2026) Kerangka tersebut selanjutnya dipertemukan dengan konsep etnofobia digital dan nilai-nilai Islam yang relevan untuk mengidentifikasi bagaimana pembelajaran PAI dapat membantu peserta didik mempertanyakan stereotip, memeriksa informasi, dan membangun pemahaman yang lebih adil terhadap perbedaan etnis. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian argumentatif dan sintesis konseptual. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, hasilnya diposisikan sebagai kerangka analitis yang memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian empiris untuk mengetahui penerapannya dalam praktik pembelajaran.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Karakteristik Etnofobia Digital sebagai Konstruksi Prasangka Etnis

Etnofobia digital dapat dipahami sebagai kecenderungan membangun ketakutan, kecurigaan, penolakan, atau penilaian negatif terhadap kelompok etnis tertentu melalui interaksi dan representasi di ruang digital. Dalam kajian ini, etnofobia digital digunakan sebagai konsep operasional untuk membaca hubungan antara stereotip etnis, prasangka, dan komunikasi digital, bukan sebagai istilah yang diasumsikan memiliki satu definisi universal. Karakteristik utamanya terlihat ketika identitas etnis dijadikan dasar untuk menggeneralisasi perilaku individu kepada seluruh anggota kelompok, memberikan pelabelan negatif, atau membenarkan perlakuan diskriminatif. Dengan demikian,

persoalannya tidak berhenti pada penggunaan bahasa yang ofensif, tetapi juga mencakup cara suatu kelompok direpresentasikan dan dinilai melalui narasi yang beredar di media digital.

Temuan penelitian Purnamawati et al. (2024) mengenai stereotip negatif etnik Madura di TikTok menunjukkan bahwa media sosial dapat berperan dalam pembentukan dan penguatan citra negatif suatu kelompok. Penelitian tersebut melaporkan bahwa 73 dari 108 responden (67,9%) menyetujui bahwa konten TikTok menjadi salah satu rujukan utama dalam pembentukan dan penguatan stereotip negatif terhadap etnik Madura. Wawancara dengan 20 informan juga mengindikasikan keterkaitan stereotip tersebut dengan prasangka, diskriminasi, dan jarak sosial antaretnik. Temuan ini memperlihatkan bahwa representasi digital dapat melampaui fungsi hiburan dan berhubungan dengan cara individu memahami kelompok etnis lain. Namun, angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks penelitian, yaitu kelompok responden dan lokasi yang dikaji, bukan sebagai gambaran seluruh pengguna media sosial di Indonesia.

Karakteristik berikutnya adalah penggunaan bahasa yang merendahkan, pelabelan kelompok, dan pengaitan identitas etnis dengan ancaman atau sifat negatif tertentu. Priyatna dan temannya pada tahun 2024 dalam kajian tentang prasangka etnis dan ujaran kebencian terhadap etnik Tionghoa di Twitter (X), menempatkan ujaran digital sebagai wacana yang perlu dibaca bersama konteks sosial dan kognisi yang melatarbelakanginya (Priyatna et al., 2024). Sejalan dengan itu, Tahir & Ramadhan (2024) mengidentifikasi sejumlah bentuk komentar kebencian dalam diskusi politik di YouTube, termasuk bahasa ofensif, dehumanisasi, demonisasi, serta ekspresi yang mengandung ancaman atau dorongan kekerasan (Tahir & Ramadhan, 2024).Walaupun penelitian tersebut tidak seluruhnya berfokus pada etnis, temuannya membantu menjelaskan bentuk-bentuk wacana digital yang dapat merendahkan pihak lain. Oleh karena itu, analisis etnofobia digital perlu memperhatikan bukan hanya kata-kata yang digunakan, tetapi juga sasaran ujaran, konteks percakapan, dan cara identitas kelompok diposisikan dalam narasi tersebut.

Etnofobia digital juga perlu dipahami melalui proses pembentukan dan penguatan prasangka. Konten yang berulang, narasi yang membingkai kelompok tertentu secara negatif, serta penyebaran informasi tanpa pemeriksaan dapat membuat representasi yang parsial tampak seolah-olah menggambarkan keseluruhan kelompok. Sonni dalam risetnya membahas bagaimana otomatisasi produksi konten, personalisasi informasi, dan manipulasi multimodal dapat memperbesar penyebaran disinformasi serta ujaran kebencian dalam ekosistem media digital Indonesia (Sonni, 2025). Sementara itu, tinjauan sistematis Beard dan temannya membahas mengenai diskriminasi rasial daring menempatkan paparan terhadap konten diskriminatif sebagai persoalan yang relevan bagi pengalaman dan relasi sosial peserta didik (Beard et al., 2025). Kedua kajian tersebut memberi landasan untuk memahami bahwa ruang digital bukan sekadar saluran penyampaian pesan, melainkan lingkungan tempat representasi sosial dapat diproduksi, diulang, dan dipertentangkan. Meski demikian, mekanisme tersebut tidak berarti setiap pengguna akan menerima konten secara pasif atau mengalami dampak yang sama.

Berdasarkan sintesis tersebut, etnofobia digital dalam penelitian ini ditandai oleh tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu representasi negatif terhadap kelompok etnis, generalisasi yang mengubah identitas kelompok menjadi dasar penilaian terhadap individu, serta penguatan prasangka melalui produksi dan peredaran narasi digital. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa etnofobia digital dapat dibaca sebagai persoalan konstruksi pengetahuan: pemahaman tentang kelompok lain dibentuk melalui informasi dan sudut pandang tertentu, bukan selalu melalui pengetahuan yang utuh dan terverifikasi. Perspektif ini menjadi penting bagi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), sebab peserta didik perlu dibimbing untuk membedakan fakta dari generalisasi, memeriksa kebenaran

informasi, dan menilai representasi kelompok secara adil. Dengan demikian, analisis karakteristik etnofobia digital menjadi dasar untuk membahas bagaimana pendekatan pendidikan multikultural James A. Banks dapat digunakan untuk mengurai prasangka etnis dalam pembelajaran PAI.

Kerangka Dekonstruksi Etnofobia Digital Berdasarkan Lima Dimensi James A. Banks

terlalu endidikan multikultural James A. Banks memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana pendidikan dapat merespons prasangka dan ketidakadilan yang muncul dalam masyarakat yang beragam. Banks (1993) menjelaskan bahwa pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari proses konstruksi yang melibatkan perspektif, asumsi, dan kepentingan tertentu. Gagasan ini relevan untuk mengkaji etnofobia digital karena informasi mengenai kelompok etnis di media sosial tidak selalu disajikan secara utuh dan berimbang. Representasi yang menonjolkan aspek negatif suatu kelompok dapat membentuk pemahaman yang parsial apabila diterima tanpa pemeriksaan kritis. Oleh karena itu, dekonstruksi etnofobia digital dalam penelitian ini dipahami sebagai proses mengidentifikasi, menguji, dan mempertanyakan asumsi serta generalisasi yang mendasari prasangka etnis. Lima dimensi pendidikan multikultural Banks digunakan sebagai kerangka analisis untuk menghubungkan persoalan tersebut dengan proses pembelajaran PAI.

Dimensi pertama, integrasi konten (*content integration*), menekankan pemanfaatan materi dan perspektif dari beragam kelompok budaya dalam pembelajaran. Dalam konteks etnofobia digital, dimensi ini dapat diterapkan dengan menghadirkan sumber belajar yang memperlihatkan keragaman pengalaman, kontribusi, dan identitas kelompok etnis secara proporsional. Peserta didik, misalnya, dapat diajak membandingkan representasi suatu kelompok dalam unggahan media sosial dengan informasi dari sumber tepercaya yang memberikan konteks lebih lengkap. Tujuannya bukan sekadar menambahkan pengetahuan tentang berbagai etnis, melainkan menghindari pemahaman yang hanya dibangun berdasarkan satu gambaran dominan. Dalam pembelajaran PAI, materi tentang akhlak, persaudaraan kemanusiaan, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat dihubungkan dengan contoh representasi etnis di ruang digital. Dengan demikian, integrasi konten menjadi langkah awal untuk memperluas sudut pandang peserta didik ketika memahami kelompok yang berbeda dari dirinya.

Dimensi kedua, proses konstruksi pengetahuan (*knowledge construction process*), memiliki hubungan langsung dengan upaya membongkar prasangka digital. Banks menekankan pentingnya membantu peserta didik memahami bagaimana pengetahuan dibentuk melalui asumsi, perspektif, dan cara suatu informasi dipilih atau ditafsirkan. Dalam ruang digital, sebuah unggahan tentang kelompok etnis tertentu dapat memuat fakta yang terbatas, konteks yang dihilangkan, atau kesimpulan yang digeneralisasi dari perilaku satu individu. Jika informasi tersebut diterima sebagai gambaran keseluruhan kelompok, proses pembentukan pengetahuan berpotensi menghasilkan prasangka. Karena itu, pembelajaran dapat mengarahkan peserta didik untuk menelaah sumber informasi, memeriksa konteks, membedakan fakta dan opini, serta mengidentifikasi generalisasi dalam suatu narasi. Dalam pembelajaran PAI, kegiatan ini dapat dikaitkan dengan nilai tabayyun dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 6. Nilai tersebut memberikan landasan normatif bagi kebiasaan memeriksa informasi sebelum menjadikannya dasar penilaian terhadap orang lain.

Dimensi ketiga, reduksi prasangka (*prejudice reduction*), berfokus pada upaya mengembangkan sikap yang lebih terbuka terhadap kelompok yang berbeda. Dalam kaitannya dengan etnofobia digital, dimensi ini tidak cukup diterapkan melalui larangan

menyebarkan ujaran kebencian, tetapi perlu diarahkan pada pemahaman mengenai bagaimana stereotip terbentuk dan mengapa generalisasi terhadap kelompok etnis dapat merugikan orang lain. Peserta didik perlu dibimbing untuk membedakan perilaku individu dari identitas kelompok serta menyadari bahwa pengalaman satu orang tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai seluruh anggota suatu etnis. Pembelajaran dapat menggunakan contoh kasus digital yang telah diseleksi secara etis untuk mengidentifikasi stereotip, mendiskusikan dampaknya, dan menyusun tanggapan yang tidak diskriminatif. Pendekatan ini sejalan dengan nilai ta'āruf dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13, yang menempatkan keberagaman sebagai dasar untuk saling mengenal. Dengan demikian, reduksi prasangka diarahkan pada perubahan cara memahami perbedaan, bukan hanya pada kepatuhan terhadap aturan komunikasi.

Dimensi keempat, pedagogi kesetaraan (*equity pedagogy*), menekankan pentingnya strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dari latar belakang berbeda untuk berpartisipasi dan memperoleh pengalaman belajar yang adil. Dalam pembahasan etnofobia digital, dimensi ini mengingatkan bahwa ruang kelas harus menjadi lingkungan yang aman untuk membicarakan perbedaan tanpa mempermalukan atau menjadikan identitas tertentu sebagai sasaran. Guru PAI dapat menggunakan diskusi berbasis kasus, pembelajaran kolaboratif, dan refleksi kritis dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Guru juga perlu memastikan bahwa proses diskusi tidak mengulang stereotip, menormalisasi ejekan etnis, atau memaksa peserta didik tertentu menjadi wakil dari kelompok identitasnya. Prinsip keadilan dalam Q.S. al-Ma'idah [5]: 8 dapat menjadi landasan etis agar peserta didik tidak memberikan penilaian berdasarkan kebencian atau prasangka. Dengan penerapan tersebut, pedagogi kesetaraan berfungsi menciptakan proses belajar yang mendorong keterlibatan, penghormatan, dan penilaian yang adil terhadap orang lain.

Dimensi kelima, pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*), memperluas perhatian dari kegiatan pembelajaran di kelas menuju kebijakan, kebiasaan, dan relasi sosial dalam lingkungan pendidikan. Dekonstruksi etnofobia digital akan sulit dikembangkan apabila nilai penghormatan terhadap keberagaman hanya disampaikan sebagai materi, tetapi tidak tercermin dalam kehidupan sekolah. Karena itu, lingkungan pendidikan perlu membangun norma komunikasi yang menolak diskriminasi, menyediakan mekanisme penanganan perundungan berbasis identitas, dan mendorong penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Guru PAI dapat bekerja sama dengan guru lain, pengelola sekolah, serta organisasi peserta didik untuk mengembangkan kegiatan literasi digital dan kampanye komunikasi yang menghargai perbedaan. Dalam kerangka Banks, budaya sekolah yang inklusif bukan hanya menuntut peserta didik mengubah perilakunya, tetapi juga menelaah apakah aturan dan praktik kelembagaan telah memberikan perlindungan serta kesempatan yang adil kepada seluruh peserta didik. Dimensi ini dengan demikian menempatkan upaya mengurangi etnofobia digital sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas guru di dalam kelas.

Kelima dimensi tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membangun kerangka dekonstruksi etnofobia digital. Integrasi konten memperluas sumber pengetahuan tentang keberagaman, sedangkan proses konstruksi pengetahuan membantu peserta didik menguji bagaimana suatu representasi dibentuk dan diterima. Reduksi prasangka diarahkan pada peninjauan kembali stereotip dan generalisasi, pedagogi kesetaraan memastikan proses pembelajaran berlangsung secara adil, dan pemberdayaan budaya sekolah memperkuat nilai tersebut melalui lingkungan pendidikan. Apabila diterapkan secara terpadu, kelima dimensi ini memungkinkan pembelajaran PAI merespons etnofobia digital pada tingkat materi, proses berpikir, sikap, interaksi kelas, dan budaya kelembagaan.

Meskipun demikian, hubungan tersebut merupakan sintesis konseptual yang disusun berdasarkan teori Banks dan nilai-nilai pendidikan Islam. Kerangka ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa prasangka peserta didik akan berkurang, sebab hasil penerapannya tetap dipengaruhi oleh strategi pembelajaran, konteks sosial, dan karakteristik peserta didik.

Berdasarkan sintesis tersebut, kerangka dekonstruksi etnofobia digital melalui lima dimensi Banks dapat diarahkan pada proses pembelajaran yang dimulai dengan mengenali representasi negatif, memeriksa sumber dan konteks informasi, mengkritisi stereotip, membangun dialog yang setara, serta memperkuat budaya sekolah yang inklusif. Dalam pembelajaran PAI, keseluruhan proses tersebut dapat dihubungkan dengan tabayyun, ta'āruf, dan keadilan sebagai landasan normatif untuk menilai informasi serta memperlakukan kelompok lain secara bertanggung jawab. Kontribusi kerangka ini terletak pada upaya mempertemukan teori pendidikan multikultural dengan persoalan prasangka etnis dalam ruang digital, sehingga pembelajaran PAI tidak hanya membahas keberagaman secara normatif, tetapi juga mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menelaah representasi digital secara kritis. Pada tahap konseptual, kerangka tersebut menyediakan dasar bagi pengembangan model pembelajaran yang lebih operasional. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji kelayakan, penerapan, dan kontribusinya terhadap literasi digital serta sikap peserta didik dalam konteks pendidikan yang nyata.

Tabel 1.
Sintesis Lima Dimensi Pendidikan Multikultural James A. Banks dalam Dekonstruksi Etnofobia Digital

Dimensi Banks	Fokus dekonstruksi	Implementasi dalam pembelajaran PAI
Integrasi konten (*content integration*)	Mengoreksi representasi etnis yang sempit dan tidak berimbang	Menggunakan sumber belajar yang menggambarkan keberagaman secara proporsional
Konstruksi pengetahuan (*knowledge construction process*)	Menguji asumsi, konteks, dan generalisasi dalam konten digital	Memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan mengidentifikasi stereotip
Reduksi prasangka (*prejudice reduction*)	Mempertanyakan pelabelan negatif terhadap kelompok etnis	Menganalisis kasus digital dan membedakan perilaku individu dari identitas kelompok
Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*)	Membangun lingkungan yang menolak diskriminasi etnis	Mengembangkan norma komunikasi digital yang inklusif dan mekanisme penanganan diskriminasi

Discussion

Integrasi Pendidikan Multikultural James A. Banks dan Nilai-Nilai Islam dalam Pembelajaran PAI

Integrasi pendidikan multikultural James A. Banks dengan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu dipahami sebagai upaya mempertemukan kerangka pedagogis dengan landasan etis dan normatif pendidikan Islam. Banks menempatkan pendidikan multikultural bukan sekadar sebagai pengenalan terhadap perbedaan budaya, melainkan sebagai pendekatan untuk mengkaji konstruksi pengetahuan, mengurangi prasangka, menciptakan keadilan dalam pembelajaran, dan membangun lingkungan pendidikan yang inklusif. Sementara itu, ajaran Islam menyediakan landasan

normatif untuk mengarahkan cara manusia memahami keberagaman dan memperlakukan sesamanya. Dalam konteks etnofobia digital, kedua perspektif tersebut relevan karena prasangka etnis tidak hanya berkaitan dengan perilaku individual, tetapi juga dengan proses memperoleh informasi, menafsirkan identitas kelompok, dan membenarkan penilaian terhadap orang lain. Oleh karena itu, integrasi Banks dan nilai-nilai Islam tidak cukup dilakukan dengan memasangkan istilah teoretis dengan ayat Al-Qur'an, tetapi harus diwujudkan dalam proses pembelajaran yang mampu menguji prasangka sekaligus membangun tanggung jawab moral peserta didik.

Landasan normatif integrasi tersebut dapat ditemukan dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13, yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (li ta'ārafū). Ayat ini memberikan dasar untuk memandang keberagaman etnis sebagai realitas kemanusiaan yang perlu dipahami, bukan sebagai alasan untuk membangun hierarki sosial berdasarkan identitas kelompok. Apabila dihubungkan dengan dimensi integrasi konten (content integration) Banks, prinsip ta'āruf dapat diterjemahkan ke dalam penyediaan materi pembelajaran yang memperlihatkan keragaman pengalaman, sejarah, dan kontribusi kelompok etnis secara proporsional. Akan tetapi, pengakuan terhadap keberagaman tidak boleh berhenti pada penyajian informasi budaya yang bersifat deskriptif. Peserta didik juga perlu diarahkan untuk mengkritisi representasi kelompok etnis yang beredar di media sosial, terutama ketika suatu identitas direduksi menjadi stereotip tertentu. Dengan demikian, ta'āruf tidak hanya menjadi nilai yang dihafalkan, tetapi juga orientasi pedagogis untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih terbuka dan menghindari generalisasi terhadap kelompok lain.

Hubungan antara pendidikan multikultural dan nilai Islam menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan proses konstruksi pengetahuan (knowledge construction process). Banks menekankan perlunya memahami bagaimana pengetahuan dibentuk melalui perspektif, asumsi, dan kerangka interpretasi tertentu. Dalam ruang digital, informasi mengenai suatu kelompok etnis dapat disajikan secara selektif, dilepaskan dari konteks, atau diperkuat melalui pengulangan narasi negatif. Persoalannya bukan semata-mata apakah suatu konten memuat informasi yang benar atau salah, tetapi juga bagaimana informasi tersebut digunakan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kelompok secara keseluruhan. Prinsip tabayyun dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 6 memiliki relevansi normatif terhadap persoalan tersebut karena mengarahkan seseorang untuk memeriksa berita sebelum mengambil tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Meskipun demikian, tabayyun tidak seharusnya dipersempit menjadi pemeriksaan faktual terhadap sumber informasi. Dalam pembelajaran PAI, prinsip ini dapat dikembangkan menjadi kebiasaan mempertanyakan konteks, mengidentifikasi generalisasi, membandingkan sumber, dan menilai konsekuensi sosial dari suatu narasi. Integrasi ini memungkinkan peserta didik memahami bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, melainkan juga praktik epistemik dan tanggung jawab etis.

Dimensi reduksi prasangka (prejudice reduction) memiliki hubungan dengan nilai persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insāniyyah) dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prasangka etnis muncul ketika seseorang memberikan penilaian terhadap individu berdasarkan anggapan yang dilekatkan kepada kelompoknya, sehingga identitas kolektif digunakan untuk menggantikan penilaian terhadap perilaku dan fakta yang sebenarnya. Dalam konteks digital, pola tersebut dapat terlihat melalui komentar yang merendahkan etnis tertentu, pelabelan kolektif, atau anggapan bahwa tindakan satu orang mewakili karakter seluruh kelompok. Pendidikan multikultural Banks mengarahkan pembelajaran untuk mengurangi prasangka melalui proses pendidikan yang secara sadar mengembangkan pemahaman dan sikap terhadap kelompok lain. Sementara itu, nilai persaudaraan kemanusiaan memberikan landasan etis agar peserta didik tidak menjadikan

perbedaan identitas sebagai dasar untuk mengurangi penghormatan terhadap orang lain. Namun, penyampaian pesan moral mengenai persaudaraan saja belum tentu cukup untuk mengubah prasangka yang telah terbentuk. Karena itu, pembelajaran PAI perlu memberi ruang bagi analisis kasus, dialog terarah, refleksi terhadap asumsi pribadi, dan pembahasan dampak stereotip terhadap individu maupun kelompok. Melalui proses tersebut, reduksi prasangka diarahkan pada perubahan cara berpikir dan menilai, bukan hanya pada tuntutan agar peserta didik menghindari ungkapan diskriminatif.

Selanjutnya, dimensi pedagogi kesetaraan (*equity pedagogy*) dapat dipertemukan dengan prinsip keadilan (al-'adl) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ma'idah [5]: 8. Ayat tersebut menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh mendorong seseorang untuk bertindak tidak adil. Prinsip ini relevan bagi pembelajaran PAI karena diskusi mengenai konflik etnis, stereotip, dan ujaran kebencian berpotensi menghadirkan ketimpangan suara apabila guru tidak mengelola proses pembelajaran secara hati-hati. Peserta didik dari kelompok minoritas, misalnya, tidak seharusnya dibebani untuk menjelaskan atau membela identitas kelompoknya, sementara peserta didik lain bebas mengemukakan generalisasi. Guru perlu menciptakan kesempatan berpartisipasi yang adil, menetapkan batas yang jelas terhadap ujaran diskriminatif, dan membedakan kritik terhadap suatu tindakan dari serangan terhadap identitas kolektif. Dalam hal ini, keadilan tidak berarti semua pendapat harus diterima dengan bobot yang sama, terutama ketika suatu pendapat didasarkan pada informasi yang tidak terverifikasi atau merendahkan martabat kelompok tertentu. Integrasi pedagogi kesetaraan dan prinsip al-'adl menuntut pembelajaran yang terbuka terhadap dialog, tetapi tetap memiliki standar argumentasi, bukti, dan tanggung jawab etis.

Integrasi tersebut juga perlu melampaui interaksi guru dan peserta didik melalui dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (empowering school culture and social structure). Banks menekankan bahwa pendidikan multikultural berkaitan dengan keseluruhan budaya dan struktur lembaga pendidikan, bukan hanya materi pelajaran. Dalam konteks PAI, nilai penghormatan terhadap keberagaman akan kehilangan daya transformatif apabila disampaikan dalam kelas, tetapi tidak tercermin dalam aturan sekolah, interaksi antarpeserta didik, atau penanganan perundungan berbasis identitas. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun budaya komunikasi yang bertanggung jawab, mekanisme pelaporan diskriminasi yang aman, serta kerja sama antara guru, pengelola sekolah, dan peserta didik dalam mencegah penyebaran konten yang merendahkan kelompok etnis. Nilai syūrā atau musyawarah dapat mendukung pelibatan warga sekolah dalam membangun kesepakatan mengenai komunikasi digital yang menghargai martabat manusia. Namun, budaya inklusif tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan slogan toleransi atau kegiatan seremonial. Ukuran yang lebih bermakna adalah sejauh mana kebijakan dan praktik sekolah memberikan perlindungan, kesempatan berpartisipasi, serta perlakuan yang adil kepada seluruh peserta didik.

Meskipun memiliki titik temu, integrasi pendidikan multikultural Banks dan nilai-nilai Islam tidak berarti keduanya identik secara epistemologis. Banks mengembangkan kerangka pendidikan dalam tradisi pemikiran pendidikan multikultural yang menekankan konstruksi pengetahuan, kesetaraan, dan transformasi lembaga pendidikan, sedangkan PAI juga berlandaskan wahyu, tradisi keilmuan Islam, dan tujuan pembentukan akhlak. Karena itu, penggunaan teori Banks perlu dilakukan secara kritis dan kontekstual, bukan dengan menganggap seluruh asumsi teoretisnya otomatis sejalan dengan setiap aspek pendidikan Islam. Rahman (2025), melalui analisis konseptual tentang rekonstruksi pendidikan multikultural untuk pendidikan Islam di Indonesia, menekankan pentingnya melihat hubungan kedua perspektif sebagai pertemuan yang memerlukan penyesuaian pedagogis, bukan sekadar penyamaan istilah. Bagi kajian etnofobia digital, konsekuensinya adalah

teori Banks digunakan untuk menganalisis bagaimana pengetahuan dan prasangka terbentuk serta bagaimana pembelajaran dapat dirancang secara inklusif, sementara nilai-nilai Islam memberikan orientasi normatif dalam memeriksa informasi, menghormati keberagaman, dan menegakkan keadilan. Pembedaan fungsi ini menghindarkan integrasi dari dua kelemahan: penggunaan teori Barat secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks pendidikan Islam dan penggunaan ayat secara normatif tanpa menjelaskan implikasi pedagogisnya.

Berdasarkan analisis tersebut, integrasi pendidikan multikultural James A. Banks dan nilai-nilai Islam dapat dirumuskan sebagai kerangka pedagogis untuk mendekonstruksi etnofobia digital melalui pembelajaran PAI. Kerangka ini menghubungkan lima dimensi Banks dengan orientasi nilai Islam: integrasi konten diarahkan untuk memperluas pemahaman tentang keberagaman melalui ta‘āruf; konstruksi pengetahuan diperkuat dengan tabayyun dan pembacaan kritis terhadap informasi; reduksi prasangka diarahkan pada pengembangan persaudaraan kemanusiaan; pedagogi kesetaraan ditopang oleh prinsip al-‘adl; sedangkan pemberdayaan budaya sekolah diwujudkan melalui lingkungan pendidikan yang inklusif dan partisipatif. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa dekonstruksi etnofobia digital tidak cukup dilakukan dengan menghapus konten kebencian atau menyampaikan pesan toleransi, tetapi memerlukan pembelajaran yang menelaah cara prasangka dibentuk, menguji dasar penilaiannya, dan membangun praktik sosial yang adil. Meskipun demikian, kerangka ini masih bersifat konseptual. Efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan literasi digital kritis dan mengurangi prasangka etnis peserta didik perlu diteliti lebih lanjut melalui penerapan dan evaluasi empiris dalam pembelajaran PAI.

Model Konseptual Dekonstruksi Etnofobia Digital dalam Pembelajaran PAI

Berdasarkan sintesis pendidikan multikultural James A. Banks dan nilai-nilai Islam, dekonstruksi etnofobia digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dirumuskan sebagai model konseptual yang menghubungkan literasi digital kritis, pengurangan prasangka, dialog multikultural, dan refleksi etis. Model ini berangkat dari pemahaman bahwa prasangka etnis di ruang digital tidak cukup diatasi melalui larangan menyebarkan ujaran kebencian atau penyampaian pesan toleransi secara normatif. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan cara peserta didik menerima informasi, menafsirkan representasi kelompok, dan membentuk penilaian berdasarkan informasi yang belum tentu utuh. Oleh karena itu, pembelajaran perlu memberikan pengalaman yang membantu peserta didik mengenali masalah, menguji dasar penilaiannya, mempertimbangkan perspektif yang berbeda, dan menentukan respons yang bertanggung jawab. Dalam model ini, lima dimensi Banks berfungsi sebagai kerangka pedagogis, sedangkan nilai tabayyun, ta‘aruf, dan keadilan menjadi landasan normatif yang mengarahkan proses pembelajaran.

Tahap pertama adalah identifikasi representasi etnis dalam ruang digital. Pada tahap ini, guru mengarahkan peserta didik untuk mengenali bentuk-bentuk stereotip, pelabelan negatif, generalisasi, dan ujaran diskriminatif dalam materi digital yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Materi dapat berupa unggahan, komentar, berita, atau contoh kasus yang telah dipilih dan diperiksa secara hati-hati agar tidak memperkuat kembali prasangka yang sedang dikaji. Peserta didik kemudian diminta mengidentifikasi kelompok yang direpresentasikan, pesan yang disampaikan, serta asumsi yang mendasari pesan tersebut. Tahap ini berkaitan dengan dimensi integrasi konten (content integration) Banks karena pembelajaran menghadirkan persoalan keberagaman sebagai bagian dari materi yang dikaji. Namun, guru tidak cukup hanya menampilkan contoh konten bermasalah. Pemilihan materi harus mempertimbangkan keamanan psikologis peserta didik, menghindari

penyebaran ulang konten berbahaya secara tidak perlu, dan memastikan bahwa kegiatan analisis tidak berubah menjadi forum untuk menghakimi kelompok etnis tertentu.

Tahap kedua adalah verifikasi informasi dan pemeriksaan konstruksi pengetahuan. Setelah mengenali representasi yang bermasalah, peserta didik diarahkan untuk memeriksa sumber, konteks, bukti pendukung, dan kemungkinan generalisasi yang terdapat dalam konten tersebut. Mereka dapat membandingkan informasi dari beberapa sumber tepercaya, membedakan fakta dari opini, serta menelaah apakah pengalaman individual digunakan untuk menyimpulkan karakter seluruh kelompok. Tahap ini mengoperasionalkan dimensi proses konstruksi pengetahuan (knowledge construction) process Banks dengan menempatkan peserta didik sebagai penelaah aktif terhadap informasi, bukan penerima pesan yang pasif. Dalam pembelajaran PAI, proses tersebut dihubungkan dengan nilai tabayyun dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 6. Integrasi ini menegaskan bahwa pemeriksaan informasi tidak hanya berkaitan dengan ketepatan pengetahuan, tetapi juga dengan tanggung jawab atas konsekuensi penilaian dan tindakan terhadap orang lain. Dengan demikian, tabayyun dapat menjadi landasan etis bagi pengembangan literasi digital kritis.

Tahap ketiga adalah dekonstruksi stereotip melalui dialog dan refleksi kritis. Pada tahap ini, peserta didik diajak mempertanyakan mengapa suatu kelompok digambarkan secara negatif, asumsi apa yang membuat gambaran tersebut tampak masuk akal, dan siapa yang berpotensi dirugikan apabila generalisasi tersebut diterima. Guru dapat menggunakan pertanyaan pemantik, diskusi kelompok, atau analisis kasus untuk membantu peserta didik membedakan identitas etnis dari perilaku individual. Proses ini berkaitan dengan dimensi reduksi prasangka (prejudice reduction) Banks, yang diarahkan pada pengembangan pemahaman dan sikap terhadap kelompok yang berbeda. Nilai ta‘āruf dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13 memperkuat tahap ini dengan menempatkan saling mengenal sebagai orientasi hubungan antarmanusia. Meskipun demikian, dialog tidak boleh dipahami sebagai kewajiban untuk memperdebatkan martabat suatu kelompok atau memberikan ruang yang sama kepada pernyataan diskriminatif dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dialog yang konstruktif harus berlangsung dengan aturan yang jelas, argumentasi yang berbasis bukti, dan penghormatan terhadap martabat seluruh peserta didik.

Tahap keempat adalah penguatan keadilan dalam interaksi dan lingkungan pembelajaran. Hasil analisis terhadap stereotip perlu dihubungkan dengan cara peserta didik berkomunikasi, berkolaborasi, dan merespons perbedaan dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang digital. Guru dapat memfasilitasi penyusunan tanggapan terhadap komentar diskriminatif, pembuatan pesan digital yang menghargai keberagaman, atau refleksi mengenai pilihan tindakan ketika menjumpai informasi yang merendahkan kelompok tertentu. Tahap ini menghubungkan dimensi pedagogi kesetaraan (equity pedagogy) dan pemberdayaan budaya sekolah serta struktur sosial (empowering school culture and social structure) Banks. Prinsip keadilan dalam Q.S. al-Ma’idah [5]: 8 menjadi landasan untuk menegaskan bahwa penilaian terhadap orang lain tidak boleh dikendalikan oleh kebencian atau prasangka. Selain itu, sekolah perlu mendukung proses pembelajaran melalui norma komunikasi yang inklusif dan mekanisme penanganan diskriminasi yang jelas. Dengan demikian, perubahan yang diharapkan tidak berhenti pada pemahaman individual, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kebiasaan interaksi yang lebih adil.

Keempat tahap tersebut membentuk alur konseptual yang saling berkaitan, bukan prosedur kaku yang harus selalu berlangsung secara linear. Hasil verifikasi informasi, misalnya, dapat membuat peserta didik kembali meninjau identifikasi awalnya; sebaliknya, dialog dapat memunculkan pertanyaan baru yang memerlukan pemeriksaan sumber tambahan. Kelima dimensi Banks juga tidak berdiri secara terpisah dalam alur ini. Integrasi konten mendukung penyediaan materi yang beragam, konstruksi pengetahuan membimbing pemeriksaan informasi, reduksi prasangka mengarahkan refleksi terhadap

stereotip, pedagogi kesetaraan menjaga keadilan proses pembelajaran, dan pemberdayaan budaya sekolah memperkuat penerapannya dalam lingkungan pendidikan. Nilai-nilai Islam memberikan orientasi etis bagi keseluruhan proses tersebut. Oleh karena itu, kontribusi model ini terletak pada penyatuan analisis kritis terhadap representasi digital dengan pembentukan tanggung jawab moral dalam pembelajaran PAI.

Secara konseptual, model ini diarahkan pada tiga hasil pembelajaran yang saling berkaitan, yaitu kemampuan mengenali dan memeriksa representasi etnis secara kritis, kemampuan menilai keberagaman tanpa mengandalkan generalisasi diskriminatif, serta kemampuan merespons konten digital secara adil dan bertanggung jawab. Ketiga hasil tersebut merupakan tujuan yang diharapkan, bukan temuan mengenai perubahan perilaku peserta didik yang telah dibuktikan melalui penelitian lapangan. Penerapan model perlu mempertimbangkan usia peserta didik, karakteristik materi PAI, konteks sosial sekolah, kompetensi guru, dan sensitivitas kasus yang digunakan. Evaluasi empiris juga diperlukan untuk menilai apakah model dapat diterapkan secara layak dan bagaimana kontribusinya terhadap literasi digital kritis serta sikap peserta didik terhadap keberagaman etnis. Dengan batasan tersebut, model konseptual ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi pembelajaran PAI yang responsif terhadap persoalan prasangka di ruang digital.

CONCLUSION

Etnofobia digital dapat dipahami sebagai persoalan prasangka etnis yang muncul dan berkembang melalui representasi negatif, generalisasi, serta penyebaran stereotip dalam ruang digital. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi Pendidikan Agama Islam (PAI), terutama dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami nilai toleransi dan persaudaraan secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya ketika berhadapan dengan informasi dan interaksi digital yang berpotensi diskriminatif. Oleh karena itu, pembelajaran PAI perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, dan sikap adil terhadap keberagaman.

Kajian ini menunjukkan bahwa lima dimensi pendidikan multikultural James A. Banks dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mendekonstruksi etnofobia digital dalam pembelajaran PAI. Integrasi konten membantu menghadirkan representasi kelompok etnis secara lebih berimbang; konstruksi pengetahuan mendorong peserta didik menguji sumber, konteks, dan asumsi di balik informasi digital; reduksi prasangka mengarahkan peserta didik untuk mempertanyakan stereotip; pedagogi kesetaraan membuka ruang dialog yang inklusif; sedangkan pemberdayaan budaya dan struktur sekolah mendukung pembentukan lingkungan pembelajaran yang menolak diskriminasi. Kerangka tersebut dapat diintegrasikan dengan nilai tabayyun, ta‘āruf, dan keadilan dalam Islam sebagai landasan etis dalam menyikapi perbedaan.

Kontribusi utama kajian ini terletak pada perumusan model konseptual yang menghubungkan pendidikan multikultural Banks, nilai-nilai Islam, dan literasi digital kritis melalui tahapan identifikasi, verifikasi, dekonstruksi kritis, serta refleksi dan tindakan etis. Model ini menawarkan arah pengembangan pembelajaran PAI yang tidak berhenti pada penyampaian ajaran tentang toleransi, tetapi juga memberi ruang bagi peserta didik untuk menganalisis dan merespons prasangka etnis di media digital. Namun, karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan analisis konseptual, model yang dirumuskan belum dapat dinyatakan terbukti efektif dalam praktik pembelajaran. Penelitian selanjutnya perlu menguji penerapannya melalui penelitian lapangan di satuan pendidikan untuk mengetahui relevansi, proses implementasi, serta kontribusinya terhadap kemampuan peserta didik mengenali dan menyikapi etnofobia digital secara kritis dan bertanggung jawab.

REFERENCES

Banks, J. A. (1993). The canon debate, knowledge construction, and multicultural education. *Educational researcher*, *22*(5), 4-14. https://doi.org/10.3102/0013189X022005004

Beard, K. S., Shortt, M., & Xie, K. (2025). The emergence and escalation of online racial discrimination in digital spaces: A systematic review. *Review of Educational Research*, *95*(1), 89-122. https://doi.org/10.3102/00346543231217459

Cera, M. (2023). Digital ethnography: ethics through the case of QAnon. *Frontiers in Sociology*, *8*, 1119531. https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1119531

Croucher, S. M., Nguyen, T., & Rahmani, D. (2020). Prejudice toward Asian Americans in the COVID-19 pandemic: The effects of social media use in the United States. *Frontiers in Communication*, *5*, 39. https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.00039

Damanik, P. C. I. C., & Kedhaton, A. S. (2026). Reframing Banks' multicultural education: Democratic subjectification and decolonial perspectives on transformative citizenship in elementary education. *Social Sciences & Humanities Open*, *14*, 103121. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.103121

Forberg, P., & Schilt, K. (2023). What is ethnographic about digital ethnography? A sociological perspective. *Frontiers in Sociology*, *8*, 1156776. https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1156776

Husni, H., Rizal, S. S., Munandar, D. S., & Selamet, S. (2024). Teachers and Multicultural Education: How do Moderate Islamic Teachers Perceive Freedom of Expression and Hate Speech. *Dinamika Ilmu*, *24*(1), 61-75. https://doi.org/10.21093/di.v24i1.8099

Kurniawan, R., Rantona, S., Mogot, Y. D. Y., & Nindhita, V. (2026). Ethnic-Cultural Bullying. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, *15*(1), 182-194.

Madriaza, P., Hassan, G., Brouillette-Alarie, S., Mounchingam, A. N., Durocher-Corfa, L., Borokhovski, E., ... & Paillé, S. (2025). Exposure to hate in online and traditional media: A systematic review and meta-analysis of the impact of this exposure on individuals and communities. *Campbell systematic reviews*, *21*(1), cl2-70018. https://doi.org/10.1002/cl2.70018

Priyatna, A. A., Wibowo, K. A., & Syafirah, N. A. (2024). Prasangka Etnis dan Ujaran Kebencian: Analisis Ujaran Kebencian terhadap Etnis Tionghoa di Twitter (X). *Jurnal Komunikasi*, *19*(1), 147-162. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss1.art9

Rahman, M. (2025). Reconstructing Multicultural Education For Islamic Education: A Critical Conceptual Analysis Of James A. Banks'five Dimensions In Indonesia. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, *6*(2).

Snyder, H. (2024). Designing the literature review for a strong contribution. *Journal of Decision Systems*, *33*(4), 551-558. https://doi.org/10.1080/12460125.2023.2197704

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, *104*, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sonni, A. F. (2025). AI-based disinformation and hate speech amplification: analysis of Indonesia's digital media ecosystem. *Frontiers in Communication*, *10*, 1603534. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1603534

Tahir, I., & Ramadhan, M. G. F. (2024). Hate Speech On Social Media: Indonesian Netizens'hate Comments Of Presidential Talk Shows On Youtube. *LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching*, *27*(1), 230-251. https://doi.org/10.24071/llt.v27i1.8180.